

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 45.
- Aminuddin Salle, dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, Cetakan Kedua, Makassar, ASPublishing, 2011, Hlm. 272.
- Ali Sofwan Husein, *Konflik Pertanahan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997, Hlm. 65.
- AP.Parlindungan IV, *Berakhirnya Hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung 1990.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011. Hal 3.
- Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta Selatan 2015.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2009

- Busyra Azheri, *Corporate Society Responsibility dari Voluntari menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta 2011, Hlm. 54
- Hadi, Protasius (1994). *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 121.
- H. M. Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Editor Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019. Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242
- I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang 2018.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetrid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta 1986.
- Mage, Bryan (2001). *The Story of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 60.
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Permata Aksara, 2015, Hlm. 72.
- Maria SW. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2001.
- Myrna A. Safitri & Tristam Moeliono, *HUKUM AGRARIA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA*, HuMA-Jakarta Jl. Jati Agung No.8, Jakarta, 2010, Hlm. 313

- Nurus Zaman, Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, PT Refika Aditama, Bandung 2016, Hlm. 50
- Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta 2019, Hlm. 101-102
- Sri Susyanti Nur, *Bank Tanah*, Makassar: As Publishing, 2010, Hlm. 52-57
- Sarjita, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja, Yogyakarta, 2005.
- Suparjo, *Perihal Pengaturan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI.
- Suruh Roiqoh, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam dalam Konsep Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)", Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 72
- Sidharta Arief, Meuwissen. 2007. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung;PT Refika Aditama. Hal. 20
- Umar Said Sugiharto, Suratman, Nurhudha Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang, Setara Press, 2015.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta 2009.
- Waskiito dan Hadi Arwono, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Pranadamedia Group, Jakarta 2017, Hlm. 271

Karya Jurnal :

Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, KEBIJAKAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Rahayu
Subekti , SH Mhum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
email: rahayusubekti@yahoo.co.id

Situs WEB :

[https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt609352f138588/aspek-
hukum-dan-implikasi-pengaturan-pengadaan-tanah-dalam-pp-cipta-
kerja/](https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt609352f138588/aspek-hukum-dan-implikasi-pengaturan-pengadaan-tanah-dalam-pp-cipta-kerja/)

[https://nasional.kompas.com/read/2014/09/22/22174931/Presiden.SBY.Re
visi.Perpres.Pengadaan.Tanah.](https://nasional.kompas.com/read/2014/09/22/22174931/Presiden.SBY.Revisi.Perpres.Pengadaan.Tanah.)

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60dad3643374/4-
penyempurnaan-substansi-uu-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-
kerja/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60dad3643374/4-penyempurnaan-substansi-uu-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-kerja/)

[https://www.bphn.go.id/data/documents/penetapan_njop_tanah_dan_ganti
_ kerugian_pembebasan_tanah_\(uu_no_12_th_1994\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/penetapan_njop_tanah_dan_ganti_kerugian_pembebasan_tanah_(uu_no_12_th_1994).pdf)

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-hari-tani-dan-
perjalanan-undang-undang-pokok-agraria](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-hari-tani-dan-perjalanan-undang-undang-pokok-agraria)

<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/proyek-strategis-nasional-psn>

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218154814-4-56191/maaf-
pak-jokowi-ada-1769-konflik-agraria-dan-41-orang-tewas](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218154814-4-56191/maaf-pak-jokowi-ada-1769-konflik-agraria-dan-41-orang-tewas)

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf

f

<https://hukumproperti.com/tata-cara-pengajuan-keberatan-dan-penitipan-ganti-kerugian-ke-pengadilan-negeri-dalam-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/>

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/225/konsolidasi-lahan-solusi-menata-ruang-untuk-permukiman-yang-lebih-baik>

<http://www.damang.web.id/2011/12/tugas-panitia-pengadaan-tanah-untuk.html>

Tinjauan Yuridis :

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pasal 1313 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pasal 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, Tim Galang Pustaka, S. Uji Pratya, Teguh Prabowo, Galang Pustaka, Hal 3

Pasal 1 Ayat (12) Tentang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 122, a). Dan b).

Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 16 – Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Pelaksanaan
Pengadaan Tanah

Pasal 2 tentang asas dan tujuan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi
Kepentingan Umum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3 dan 4)

Pasal 1 angka 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2012, TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah
dan BendaBenda yang Ada Diatasnya.

Pasal 1 Ayat (3) Perpres No 36 Tahun 2005

Pasal 1 Ayat (6) Perpres No 36 Tahun 2005

Pasal 1 Ayat (10) Perpres No. 36 Tahun 2005

Pasal 7 Perpres No. 36 Tahun 2005

Pasal 20 Perpres. No. 36 Tahun 2005

Pasal 1 angka 3 Perpres. No. 65 Tahun 2006

Pasal 10 Ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006

Pasal 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006

Pasal 15 Ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006 Perubahan atas Perpres No 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permen No 21 Tahun 2017 Tentang Tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh lembaga manajemen aset negara